

Kabid Dinas PMD Nunukan Fery Wahyudi, S.Sos Resmi Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa di Tarakan

Tarakan, 15 Oktober 2024 ; Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk **“Penyusunan Dokumen SPJ APBDesa dan Implementasi Sistem Informasi dalam Tata Kelola Keuangan Desa”**. Acara ini diselenggarakan di Hotel Diamond, Kota Tarakan, dari tanggal 14 hingga 17 Oktober 2024, dengan partisipasi aktif dari berbagai elemen pemerintahan desa dan kecamatan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Fery Wahyudi,S.Sos yang menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola keuangan desa menjadi prioritas untuk memastikan dana desa yang besar bisa digunakan secara tepat guna dan bermanfaat langsung bagi masyarakat desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh Fery Wahyudi Kabid Dinas PMD Nunukan, Drs Rusmansyah Camat Lumbis, Justinus,S.Sos,M.AP Camat Lumbis Hulu, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Operator Desa dari seluruh desa di Kecamatan Lumbis dan Lumbis Hulu. Selain itu, perwakilan dari Pendamping Desa Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Hulu turut ambil bagian, memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Salah satu peserta yang menonjol dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Pemerintah Desa Dabulon, yakni **Kalisun** (Kasi Pemerintahan), **Yutang** (Kaur Perencanaan), dan **Rena Kumala Sari** (Operator Sistem Informasi Keuangan SIKS-NG Desa). Mereka hadir untuk memperdalam pemahaman tentang mekanisme pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan profesional di desa Dabulon.

Narasumber utama yang hadir adalah para ahli dari Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sahabat Persada, yang memiliki pengalaman luas dalam memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa. Materi yang disampaikan mencakup

teori pengelolaan keuangan, praktik penyusunan dokumen SPJ, hingga simulasi penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital.

Tema Bimtek kali ini mengangkat dua isu kunci dalam tata kelola desa, yakni **penyusunan dokumen SPJ APBDesa** (Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan **implementasi sistem informasi keuangan desa (Siskeudes)**. Kedua topik ini menjadi sangat relevan di tengah tuntutan akuntabilitas publik dan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Pemerintah Pusat (Negara) khususnya atau kepada masyarakat Desa Dabulon pada umumnya.

Penyusunan SPJ APBDesa merupakan hal fundamental dalam pelaporan penggunaan dana desa, yang harus dilakukan secara rinci dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah sedikit saja, bisa berdampak pada keterlambatan pencairan dana desa tahun berikutnya, atau bahkan menjadi temuan dalam audit. Kesalahan tersebut dapat bersifat fatal terhadap kinerja Pemerintahan Desa Dabulon serta dapat berimbas pada program pembangunan berkelanjutan yang sedang dilaksanakan.

Sementara itu, sistem informasi keuangan desa diharapkan mampu memodernisasi pengelolaan anggaran desa. Sistem ini diharapkan akan mempermudah administrasi keuangan, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses penyusunan laporan, sehingga mengurangi risiko kesalahan administrasi dan mempercepat transparansi. Dalam satu tahun terakhir ini sedang gencar-gencarnya dilakukan bimbingan teknis terkait implementasi SPJ Online bagi Pemerintah Desa di seluruh Indonesia, yang pada hari ini juga sedang dilaksanakan di kota tarakan . Hal tersebut yang berdampak pada percepatan Digitalisasi di Pemerintahan Desa Dabulon untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia terutama bagi Perangkat Desa dan Operator Desa atau Operator SIKS-NG Desa.

Desa Dabulon yang diwakili oleh Kalisun, Yutang, dan Rena Kumala Sari, turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dalam salah satu sesi diskusi, Kalisun menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana desa, terutama di wilayah seperti Kecamatan Lumbis yang masih sangat bergantung pada dukungan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Kalisun menyampaikan, "Dengan hadirnya sistem informasi keuangan yang terintegrasi, kami berharap Desa Dabulon bisa lebih cepat dalam menyusun laporan keuangan, sehingga pencairan dana berikutnya bisa dilakukan tepat waktu dan pembangunan desa bisa lebih terarah." Yutang, yang bertanggung jawab dalam perencanaan desa, menambahkan bahwa sistem ini diharapkan bisa membantu dalam monitoring setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program di desa, sehingga kendala yang dihadapi bisa cepat ditangani.

Sementara itu, **Rena Kumala Sari**, sebagai Operator SIKS-NG Desa Dabulon, menyoroti pentingnya penguasaan teknologi bagi operator desa. "Kami sebagai operator yang mengelola sistem ini harus benar-benar memahami cara kerja perangkat lunak yang digunakan, agar data yang di-input valid dan sesuai dengan ketentuan," ungkapnya. Keikutsertaan mereka dalam Bimtek ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam tata kelola administrasi keuangan di Desa Dabulon.

Kegiatan Bimtek ini berlangsung selama empat hari dengan berbagai agenda yang dikemas dalam bentuk presentasi, diskusi, serta simulasi. Pada hari pertama, para peserta melakukan registrasi atau cek in Hotel oleh panitia serta untuk mendapatkan nomor kamar. Hari kedua, pembukaan kegiatan Bimtek serta peserta diperkenalkan dengan dasar-dasar pengelolaan keuangan desa, termasuk regulasi yang harus diikuti dalam penyusunan SPJ APBDesa. Sesi ini memfokuskan pada pemahaman aspek legal dan konsekuensi dari kesalahan administrasi. Tata catara penyusunan Dokumen SPJ dan tata kelola Sistem Keuaangan Desa (SPJ Online). Selain itu peserta nantinya juga akan mendapatkan Sertifikat dan Aploikasi Sapa Desa.

Acara Bimtek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan dokumen keuangan dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan desa-desa yang lebih mandiri dalam mengelola anggaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan dana yang tepat guna.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, Desa Dabulon dan desa-desa lainnya di Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Hulu diharapkan dapat menjadi contoh desa yang mampu mengelola dana desa secara profesional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.